

KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR JAMBI

**Studi Dramaturgi Hasan Basri Agus (HBA) dalam Menjalankan
Kepemimpinan**

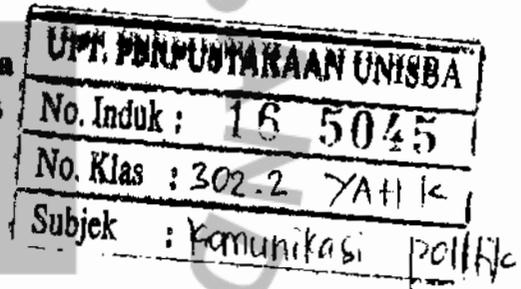
TESIS



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Sains
Pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Komunikasi Politik

Oleh:

Ahmad Harun Yahya
NPM : 20080012023



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BANDUNG
2014**



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN

KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR JAMBI
Studi Dramaturgi Hasan Basri Agus (HBA) dalam
Menjalankan Kepemimpinan

Oleh :
Ahmad Harun Yahya
NPM : 20080012023

16 5045

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Sains
Pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Komunikasi Politik

Bandung,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, MA.

Dr. Dadan Mulyana, M.Si.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, MS



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

PENGESAHAN

Judul : KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR JAMBI
(Studi Dramaturgi Hasan Basri Agus (HBA)
dalam Menjalankan Kepemimpinan)

Oleh
Nama : Ahmad Harun Yahya
NPM : 20080012023
Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, MA.
Pembimbing Pendamping : Dr. Dadan Mulyana, M.Si.
Dijikan Tanggal : 24 Juli 2014

Telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
Pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Komunikasi Politik.

Bandung, 1 September 2014

Direktur,



Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Ahmad Harun Yahya
NPM : 20080012023
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Komunikasi Politik
Judul Tesis : **Komunikasi Politik Gubernur Jambi**
(Studi Dramaturgi Hasan Basri Agus (HBA) dalam
Menjalankan Kepemimpinan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar (Sarjana, Magister, Doktor) di suatu Perguruan Tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini tertulis dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti ternyata saya memberikan pernyataan yang tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Bandung, 18 Juli 2014



(Ahmad Harun Yahya)

ABSTRAK

Hasan Basri Agus adalah pemenang dalam “pesta politik” masyarakat provinsi jambi 2010 lalu. Mengawali karir sebagai seorang PNS, kemudian menjadi camat, terpilih menjadi Bupati Sorolangon, hingga akhirnya tahun 2010 mengantarkan HBA menjadi orang nomor satu di Provinsi Jambi sebagai gubernur periode 2010-2015. Dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai seorang Gubernur, Hasan Basri Agus (HBA) menerapkan prinsip-prinsip komunikasi politik sebagai hal yang di anggap penting untuk membangun hubungan dan interaksi dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan paradigma konsturktivis. Berdasarkan paradigma tersebut, selanjutnya pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan dramaturgi. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara objektif tentang komunikasi politik Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) dalam menjalankan kepemimpinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi Politik Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) dalam menjalankan kepemimpinan serta sejauhmana pendekatan dramaturgi yang diperankan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) di wilayah *front stage*, *back stage* dan *outside stage*.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam wilayah *front stage* (panggung depan) Gubernur Jambi HBA berhasil memperlihatkan diri sebagai pemimpin yang mengayomi, agamis dan kharismatik di mata masyarakat Jambi. Sedangkan di wilayah *back stage* (panggung belakang) HBA tidak terlalu jauh berbeda dengan wilayah *front stage* (panggung depan) hanya saja tidak semua mengetahui bahwa *back stage* HBA adalah sosok yang sangat didominasi oleh sang isteri. Wilayah *outside stage*, merupakan wilayah tersembunyi yang hampir tidak diketahui oleh orang lain.

Kata Kunci: *Komunikasi Politik, front stage, back stage, outside stage*

ABSTRACT

Hasan Basri Agus is a winner in the "political party" community Jambi province 2010. He began his career as a civil servant, then became head of the subdistrict, was elected regent Sorolangon, until finally in 2010 to deliver HBA become the number one in the province of Jambi as governor 2010-2015. In carrying out its leadership as a governor, Hasan Basri Agus (HBA) to apply the principles of political communication as it is considered important to build relationships and interaction with the community.

This study used a qualitative method using a paradigm konstruktivis Under this paradigm, the next approach I use is the dramaturgical approach. This study seeks to provide an objective overview of political communication Jambi Governor Hasan Basri Agus (HBA) in running leadership.

The purpose of this study was to determine how a communication Political Jambi Governor Hasan Basri Agus (HBA) in running the right leadership and the extent of approach dramaturgi played Jambi Governor Hasan Basri Agus (HBA) in the front stage, back stage and outside the stage.

The results of this study ngindikasikan me that in the front area of the stage (stage front) HBA Jambi governor managed to show himself as a leader of the guard, religious and charismatic in the eyes of the people of Jambi. While in the back stage area (behind the stage) HBA is not too much different from the front area of the stage (stage front) just not all know that the back stage of the HBA is highly dominated by the figure of his wife. The area outside the stage, a hidden area that is almost unknown by others.

Keywords: *Political Communication, front stage, back stage, outside stage*

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain kata syukur kepada sang Maha Pencipta dan Maha Pemberi. Semua hal berasal dari-Nya termasuk ilmu pengetahuan seperti yang tertuang dalam skripsi ini. Sungguh, ilmu ini hanyalah setitik debu di lautan ilmu-Nya yang tak terbatas. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada figur reformasi sejati pemersatu ummat yang hakiki Nabi Muhammad Saw sang penuntun menuju jalan kebenaran. Semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, tidak bisa penulis balas dengan sesuatu yang lebih baik. Hanya balasan Tuhan yang tak terhingga, yang sekiranya dapat membalas sebagai kebaikan yang penulis terima.

Tesis ini berjudul : **“Komunikasi Politik Gubernur Jambi (Studi Dramaturgi Hasan Basri Agus (HBA) dalam Menjalankan Kepemimpinan“** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik di Universitas Islam Bandung. Penyusunan tesis ini berdasarkan beberapa literatur dari berbagai sumber, serta hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan terhadap komunikasi Hasan Basri Agus dalam menjalankan kepemimpinan dengan pendekatan dramaturgi..

Penyusunan tesis ini, peneliti banyak sekali memperoleh bantuan baik berupa bimbingan, saran, kritikan, dorongan moril maupun materil dari berbagai

pihak. Oleh karena itu ijinkanlah peneliti untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Unisba yang dengan keridhoan dan penghalalannya kepada penulis untuk bisa belajar dan “bermain” di kampus Program Pasca Sarjana Unisba.
2. Prof.Dr.Hj.Neni Yulianita, MS sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Unisba yang telah memberikan yang tak bosan-bosannya dorongan semangat dan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi, MA .sebagai Pembimbing utama, atas arahan dan bimbingannya. Beliau sudah sangat lama peneliti kenal, beliau inspirasi bagi peneliti.
4. Dr. Dadan Mulyana, M.Si. sebagai Pembimbing pendamping, atas arahan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran. Terima Kasih banyak pak
5. Gubernur Jambi beserta keluarga dan seluruh para staf yang telah membantu dalam proses penelitian.
6. Orang Tua yang telah melahrikank dan keluargaku yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus belajar, belajar dan belajar. Ini semua aku persembahkan untukmu ayah dan ibuku. Doaku juga akan selalu hadir untukmu.
7. Keluarga besar”; *HMI Cabang Kabupaten Bandung* yang turut memberi wahana pemikiran-pemikiran kepadaku, senior-seniorku dan adinda-adinku di HMI.

8. Keluarga besar Pascasarjana Fikom Unisba Angkatan 2012; yang turut memberi semangat dan motivasi untukku.
9. Seluruh staf, dosen pengajar di Pascasarjana Program Studi Magister ilmu komunikasi Unisba, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan ilmu-ilmu kehidupan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, karenanya dengan segala kerendahhatian peneliti mohon maaf diri serta mengharapkan saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna perbaikan untuk masa yang akan datang.

Bandung, Juli 2014

Penulis

Ahmad Harun Yahya

DAFTAR ISI

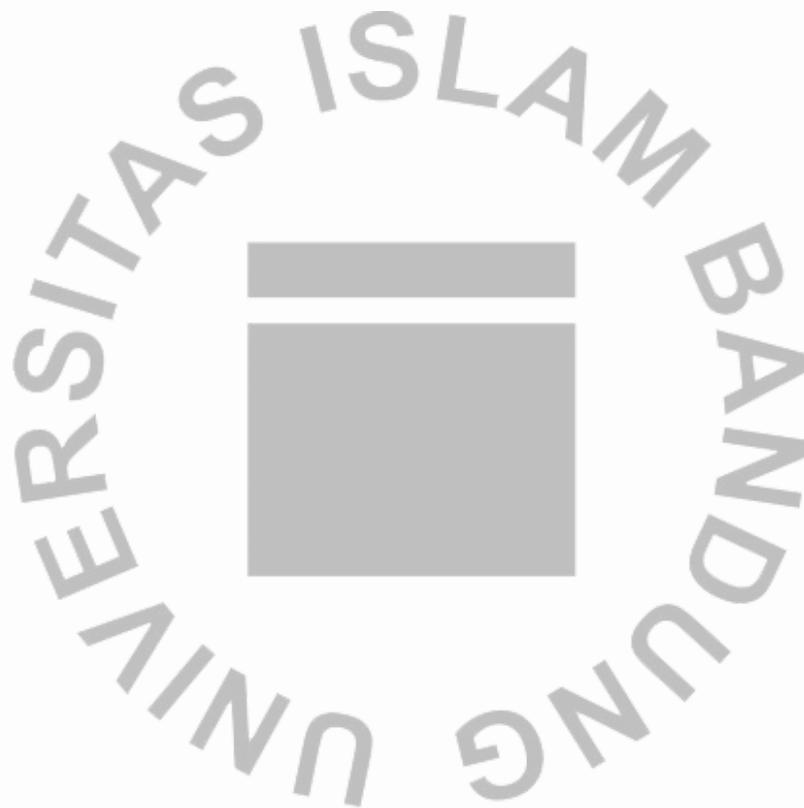
Halaman Judul
Lembar Persetujuan
Lembar Pengesahan

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
Halaman Judul	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian	12
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Kegunaan Penelitian	13
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	13
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.1.1 Analisis Penelitian Terdahulu Tentang Komunikasi Politik.....	15
2.2 Pengertian Komunikasi Politik.....	21
2.3 Unsur Komunikasi Politik.....	23
2.4 Fungsi Komunikasi Politik	24
BAB III METODOLOGI, SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	60
3.1 Metodologi Penelitian.....	60
3.1.3 Metode Penelitian.....	60
3.2.3 Keunikan Penelitian.....	62

3.1.3 Metode Penelitian.....	60
3.2.3 Keunikan Penelitian.....	62
3.3.3 Sumber Data.....	63
3.3.4 Teknik Analisis Data.....	65
3.3.5 Uji Keabsahan Data.....	71
3.2 Objek Penelitian.....	72
3.3 Latar Belakang Provinsi Jambi.....	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	83
4.1 Deskripsi Profil Informan.....	83
4.1.1 Informan Utama.....	83
1. Hasan Basri Agus (HBA).....	84
2. Yusniana Hasan Basri Agus.....	91
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	90
4.2.1 <i>Front Stage</i> (Panggung Depan) Gubernur Jambi.....	91
4.2.1.1 Proses Penciptaan Panggung Depan.....	93
4.2.1.2 <i>Setting</i> dan <i>Personal Front</i> HBA di Panggung Depan.....	97
4.2.2 <i>Back Stage</i> (Panggung Belakang) Gubernur Jambi.....	101
4.2.3 <i>Outside Stage</i> (Luar Panggung) Gubernur Jambi.....	108
4.3 Pembahasan.....	111
BAB V PENUTUP.....	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii

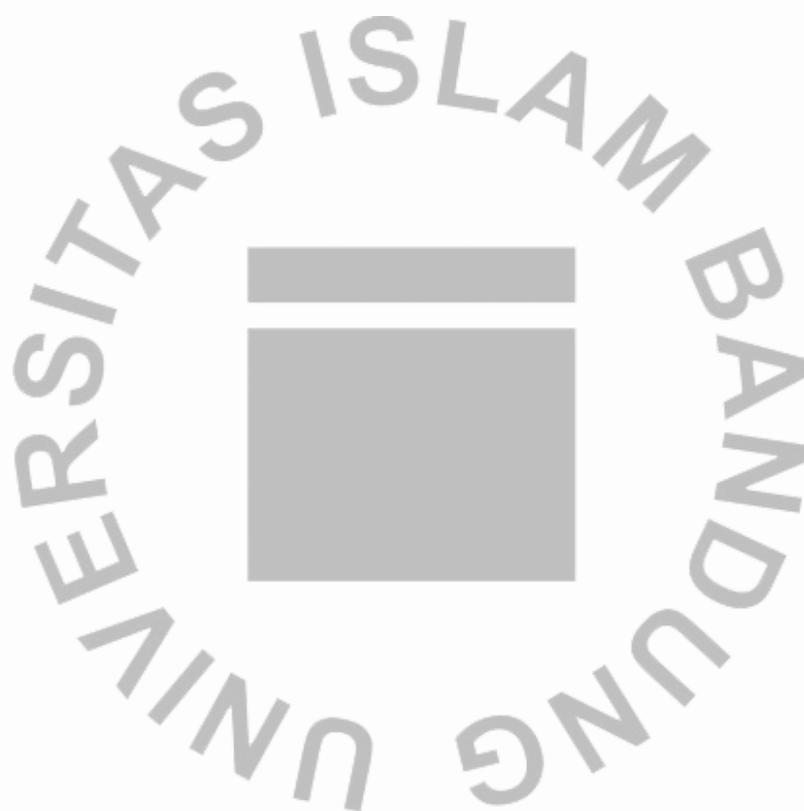
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran	60
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Kualitatif.....	68
Gambar 4.1 Model Front Stage HBA.....	102
Gambar 4.3 Model Panggung Acak HBA	109



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.....	20
Tabel 3 1 Daftar Informan Penelitian.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Setiap negara memiliki sistem tersendiri untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya, sistem pemerintahan diperlukan guna mengatur kelangsungan hidup negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki sistem negara tersendiri yang dianut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem Pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial), yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan adalah Presiden. Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden adalah Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Melalui Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004, telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistik.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah (Siswanto, 2008).

Defenisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama. Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan

mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Joeniarto, 1992). Irawan Soejito, 1990, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni *to choose between a dispersion of power and unification of power* (Lislie, 1957). *Dispersion of power* adalah sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari John Locke dan menjadi pilihan para *founding fathers* NKRI pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara .

Berdasarkan tujuan, desentralisasi yaitu:

1. untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat local;
2. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan local;
3. melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
4. mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Implementasi sistem desentralisasi (otonomi daerah) merujuk format yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan kedua UUD 1945 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Menurut Mardiasmo (2004: 96), kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman

disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidak merataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia.

Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintahan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya daerah otonom menciptakan kemandirian untuk membangun daerahnya.

Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni *to choose between a dispension of power and unification of power*. *Dispension of power* adalah sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari John Locke. Berdasarkan tujuan desentralisasi, yaitu:

1. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat local;
2. Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan local;
3. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
4. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemilihan kepala daerah bagian dari Otonomi Daerah artinya pemilihan kepala daerah yang dahulunya dipilih oleh DPRD berubah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui yang disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada sendiri pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Namun setelah itu keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa pemilihan kepala daerah bukan lagi bagian dari Otonomi Daerah, tetapi bagian dari Pemilu. Oleh karena itu penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU secara nasional. Sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilukada.

Setelah itu diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dimana di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sebab sesuai dengan UUD tersebut yang menyebutkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Sehingga bukan disebut kepala daerah tetapi disebut langsung jabatannya yaitu gubernur, walikota atau bupati namun disebut Pilgub, Pilbup dan Pilwakt.

Munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekwensi dari komitmen terhadap demokrasi, sehingga perlu diupayakan agar pemimpin dalam otonomi daerah dapat membangkitkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam program-program pemerintah. Layanan kepada masyarakat tidak, semata-mata berdasar pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga unsur kebersamaan (equality). Dengan demikian perlunya kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Memasuki perubahan dunia yang begitu cepat, kita dihadapkan paling tidak dua tantangan, yaitu tantangan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industri, dan tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca Industri. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyesuaian paradigma dan praktek kepemimpinan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pada tanggal 19 juni 2010 yang lalu, masyarakat provinsi Jambi melaksanakan pilkada dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2010-2015. Akhirnya Rapat pleno KPU Provinsi Jambi dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2010-2015 menetapkan pasangan Hasan Basri Agus- Fachrori Umar (HBA-Fachrori) sebagai pemenang dalam ajang Pemilu Kada 2010 di Provinsi Jambi. HBA memperoleh 607.030 suara atau 40,60 persen.

Dari rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan gubernur dan wakil gubernur Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi HBA unggul di lima kabupaten, yakni Kota Jambi, Sarolangun, Batanghari, Merangin, dan Muaro Jambi. Sementara lima daerah lainnya dibagi rata oleh pasangan lainnya. Pasangan Madjid Mu'az-Abdullah Hich (MM-Hich) unggul di Tanjung Jabung Timur dan Tebo. Zulfikar Achmad-Ami Taher (ZA-Ami) menang di Bungo dan Kerinci. Dan pasangan Safrial-Agus Setiyonegoro (SAS) hanya menang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2010 lalu dapat dikatakan adalah “pertempuran” para bupati, dikarenakan semua kandidat gubernur adalah bupati di daerahnya masing-masing yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi.

Hasan Basri Agus merupakan pemenang dalam “pesta politik” masyarakat provinsi jambi 2010 lalu, mengawali karir sebagai seorang PNS kemudian camat dan menjadi Bupati Sorolangun selama dua periode hingga akhirnya tahun 2010 HBA menjadi orang nomor satu di Provinsi Jambi sebagai gubernur periode 2010-2015. Kepemimpinan HBA dikenal begitu kharismatik sehingga mampu merebut hati masyarakat provinsi jambi dengan kemenangan yang cukup mutlak.

Menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi tentu bukan persoalan yang sederhana, sebagai seorang gubernur HBA harus mampu mengemas pesan dan membangun citra diri dan menjaga citranya di masyarakat, mengingat 2015

masa periode HBA akan habis dan beliau masih sangat berpeluang untuk maju kembali di periode kedua.

Ini menarik untuk dikaji dan diteliti, pada tingkat popularitas dan elaktabilitas seorang calon tentu tidak bisa diraih dengan begitu saja. Pencapaian tersebut melalui proses serta strategi yang dijalankan oleh Hasan Basri Agus (HBA) dalam hal ini berkaitan dengan komunikasi politik. Menurut Nimmo (1983:18) mengkaji tentang perilaku komunikasi politik dan makna merupakan manifestasi dari Perspektif aksi diri, perspektif interaksi dan perspektif transaksi.

Perspektif aksi diri dalam hal ini adalah bahwa di dalam diri manusia terdapat kekuatan (motif, sikap, dorongan, rangsangan, kapasitas dan lain lain) yang menentukan perbuatannya. Jadi perilaku manusia diinterpretasikan menurut factor-faktor internalnya.

Sedangkan perspektif interaksi adalah menempatkan kekuatan-kekuatan yang menentukan kelakuan manusia sebagai berada di luar individu, yang mengimbangkan sesuatu dengan yang lain dan saling hubungan sebab-akibat. Kekuatan tersebut adalah kedudukan social dan ekonomi, peran social, tuntutan kelompok, ketentuan larangan budaya, kebiasaan dan hukum. Dan Perspektif transaksi; yang memahami perbuatan manusia apa yang dipikirkan, dirasakan, dan apa yang dilakukannya, timbul dari makna yang diberikan orang kepada hal-hal fisik. Social dan hal yang abstrak, makna diturunkan melalui transaksi yang dimiliki orang dengan sesamanya.

Berdasarkan perspektif diatas, menjadi sangat relevan pemahaman terhadap kajian ini diletakkan pada apa yang dilakukan oleh para politisi dalam

melakukan peran politiknya di panggung depan dan panggung belakang kehidupan politik. Dalam perspektif Erving Goffman peran politik tersebut layaknya pertunjukan drama atau teater. Oleh karena itu, Erving Goffman menyebut sebagai dramaturgis, yang menggunakan bahasa dan tansil panggung teater (Polloma, 1987;233).

Pendekatan dramaturgis Goffman khususnya berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya (Dedy Mulyana, 2001; 107). Dalam tindakan tersebut terdapat suatu tindakan untuk menjaga citra (nilai) diri dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari menjadikan citra tersebut tidak ideal.

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Kepemimpinan Hasan Basri Agus sebagai seorang Gubernur. Bagaimana sosok HBA menjaga elektabilitas dan mengemas citra dirinya dihadapan masyarakat Provinsi Jambi. HBA menyadari bahwa periode pemerintahannya merupakan panggung politik dimana citra diri yang positif harus dikedepankan karena sangat mempengaruhi jalannya visi misi yang ingin dicapai oleh HBA berupa Jambi Emas 2015. HBA dapat dikatakan memang merupakan gubernur yang kharismatik, itulah yang barangkali menyebabkan HBA mampu secara mulus mencapai karir politik tertinggi hingga menjadi gubernur.

Dalam konteks komunikasi seorang kepala daerah berperan sebagai seorang komunikator, dikarenakan kepala daerah menyampaikan suatu pesan kepada warganya yang dalam hal ini menempati posisi sebagai komunikan. Dan

dalam upaya menyampaikan pesan secara optimal kepala daerah melakukan pengelolaan kesan agar tercipta *self image* yang positif. Pengelolaan kesan tersebut salah satunya dilakukan dengan mengelola kesan mereka melalui simbol verbal dan non verbal baik dalam domain panggung depan maupun panggung belakang.

Penelitian ini terfokus pada upaya pembangunan pencitraan politik yang dilakukan oleh Gubernur dalam konteks pendekatan teori dramaturgis. Pada dasarnya pencitraan politik memang telah dilakukan HBA saat menjadi camat, bupati hingga terpilih menjadi gubernur. Akan tetapi citra tersebut harus dijaga dan dipertahankan.

Jabatan kepala daerah adalah jabatan politis, dimana setiap kesempatan kepala daerah tampil selalu berusaha tampil sebaik mungkin melalui pengelolaan kesan yang dibangun, sehingga menghasilkan pencitraan positif bagi kepala daerah itu sendiri. Program – program kerja yang dijalankan oleh Gubernur merupakan panggung politik yang mempunyai efek positif bagi masyarakat serta citra positif bagi Gubernur itu sendiri.

Didalam buku Lely Arianie Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di panggung politik, Friedrich Nietzsche menyatakan bahwa politikus hanyalah aktor yang menciptakan citra ideal untuk diri mereka sendiri, dan citra adalah suatu integrasi mental yang halus dari berbagai sifat yang diproyeksikan oleh orang itu, dipersepsi dan diinterpretasikan rakyat menurut kepercayaan, nilai dan pengharapan mereka.

Nimmo (1989:17) menyatakan bahwa sepertinya para politisi mendapat kesulitan besar untuk bisa dikenal bahkan untuk membangun citra. Maka dilakukanlah berbagai upaya untuk memperoleh citra positif. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Jambi dalam menjalankan roda pemerintahan ini melakukan pencitraan melalui pengelolaan kesan program – program yang dijalankannya.

1.2 Fokus Penelitian

Penulis merumuskan masalah penelitian adalah “Bagaimana Komunikasi Politik Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dalam Menjalankan Kepemimpinan”?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana Setting *Front Stage* (Panggung Depan) Gubernur Jambi dalam menjalankan Kepemimpinan?
- 2) Bagaimana Setting *Back Stage* (Panggung Belakang) Gubernur Jambi dalam menjalankan Kepemimpinan?
- 3) Bagaimana Setting *Outside Stage* (Luar Panggung) Gubernur Jambi dalam menjalankan Kepemimpinan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Setting *Front Stage* (Panggung Depan) Gubernur Jambi dalam menjalankan Kepemimpinan

- 2) Untuk mengetahui Setting *Back Stage* (Panggung Belakang) Gubernur Jambi dalam menjalankan Kepemimpinan
- 3) Bagaimana Setting *Outside Stage* (Luar Panggung) Gubernur Jambi dalam menjalankan Kepemimpinan?

1.5 Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rincian identifikasi masalah yang telah dikemukakan, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna secara teoritis terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dramaturgi komunikasi politik Gubernur Jambi dalam menjalankan kepemimpinan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna, yaitu untuk:

a. Peneliti

Sebagai suatu pembelajaran, sumber pengetahuan, dan pengalaman terutama dalam kajian tentang studi dramaturgi yang dilakukan oleh Gubernur Jambi dalam menjalankan Kepemimpinan.

b. Program Studi Ilmu Komunikasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Program Studi Ilmu Komunikasi untuk dijadikan sebagai *literature*, atau sebagai salah satu

sumber pengetahuan baru mengenai masalah yang diteliti. Terutama bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

